



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna Nomor 3, Singaraja, Telepon/fax:(0362-3301559)
Email: inspektorat@bulelengkab.go.id
Website: <http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id>

Nomor : 700.1.2.7/324/Itda/2024
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Singaraja, 12 Februari 2024
Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
di -
Singaraja

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 800.1.11.1/019/ITDA/2024 tanggal 16 Januari 2024 dalam rangka melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Buleleng pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dengan tujuan mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
2. Evaluasi dilaksanakan dengan ruang lingkup yaitu:
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
 - b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai untuk kemudian diolah dengan cara membandingkan total nilai evaluasi yang diperoleh dengan nilai bobot total hasil evaluasi, dan dituangkan dalam bentuk nilai angka dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Predikat dan interpretasinya adalah sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA Nilai >90 – 100 Sangat Memuaskan	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
A Nilai >80 – 90 Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
BB Nilai >70 – 80 Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
B Nilai >60 – 70 Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
CC Nilai >50 – 60 Cukup	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas

Predikat	Interpretasi
(Memadai)	kinerja pada unit kerja.
C Nilai >30 – 50 Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D Nilai >0 – 30 Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng tersaji sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	20,70
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			65,95
Kategori			B

Nilai **65,95** dengan kategori **B** dapat diinterpretasikan bahwa AKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sudah **baik**, namun masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

4. Hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 4 komponen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Komponen Perencanaan Kinerja

1) Kualitas Perencanaan Kinerja:

Perencanaan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng belum menyajikan diagram Crosscutting yang menunjukkan kesinambungan antar unit organisasi atau unit kerja lain untuk pencapaian tujuan dan sasaran kerja

2) Pemanfaatan Perencanaan Kinerja:

Dokumen Perencanaan Kinerja sudah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

1) Kualitas Pengukuran Kinerja:

a) Belum terdapat sumber data pengukuran kinerja (format data pengumpulan kinerja) seperti yang tertuang dalam SOP

b) Menggunakan media berbasis elektronik dalam mengumpulkan dan mengukur kinerja

2) Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

a) Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

b) Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk menyesuaikan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

c. Komponen Pelaporan Kinerja:

1) Kualitas Pelaporan Kinerja:

a) Dokumen laporan kinerja belum mencantumkan perbandingan capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya.

b) Belum dapat menyajikan laporan kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional

c) Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun belum spesifik.

2) Pemanfaatan Pelaporan Kinerja:

Laporan Kinerja telah memberikan informasi mengenai target dan realisasi yang telah ditetapkan pada sasaran dan perjanjian kinerja sepenuhnya sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan meliputi program, sub kegiatan, dan kegiatan.

d. Evaluasi Kinerja

1. Kualitas Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan I, II, III dan IV sejauh ini sudah dilaksanakan dengan baik, namun terdapat kekurangan diantaranya pada Laporan Monev belum dilampirkan dengan notulensi/ berita acara, daftar hadir yang di tanda tangani oleh pimpinan OPD serta evaluasi belum dilakukan secara berjenjang.

2. Pemanfaatan Evaluasi

a). Hasil evaluasi kinerja program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang Hasil evaluasi rencana aksi secara tertulis belum ada, namun monitoring atas rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

b). Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022 oleh Inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti

5. Rekomendasi

Sehubungan dengan belum memadainya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, kami merekomendasikan kepada kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng agar:

a. Komponen Perencanaan Kinerja

Segera Membuat Diagram Cross Cutting agar Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

1) SOP Pengumpulan dan Pengukuran data Kinerja disesuaikan

dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah serta kedepan dalam melakukan Monev pengukuran kinerja triwulanan dilengkapi dengan format pengumpulan data kinerja seperti yang tertuang dalam SOP.

- 2) Menggunakan media berbasis elektronik dalam mengumpulkan dan mengukur kinerja,
- 3) Pengukuran Kinerja dapat sepenuhnya digunakan untuk menyesuaikan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien,
- 4) Kedepan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

c. Komponen Pelaporan Kinerja

- 1) Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
- 2) Laporan kinerja menyajikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.
- 3) Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara rinci mulai dari sasaran, indikator, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran yang terealisasi.

d. Evaluasi Kinerja

- 1) Menyusun SOP evaluasi kinerja yang mengacu pada Peraturan Bupati Buleleng nomor 65 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 2) Mengoptimalkan evaluasi kinerja secara berjenjang dari program sampai dengan sub kegiatan dan membuat laporan hasil Evaluasi Kinerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
- 3) Menindaklanjuti seluruh Hasil Evaluasi AKIP tahun 2022 dan 2023 dengan membuat matriks tindak lanjut.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,

I Putu Karuna, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660602 199403 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Arsip